

Penyamaan Persepsi Multi Pihak Dalam Pengelolaan DAS



Pembukaan Diskusi dan Pengukuhan MKTI Sumsel.

KETUA Fordas Sumsel Dr Ir Edward Saleh MS mengatakan, kondisi DAS di Provinsi Sumsel semakin rusak, hal ini dapat dilihat dari sungai yang semakin keruh, dan tanah di hulu terbawa ke hilir. Sementara masyarakat di hilir sungai belum bersinergis dengan masyarakat hulu.

Karena itu, Forum DAS Sumsel yang difasilitasi Balai Pengelolaan (BP) DAS Musi Provinsi Sumsel mencanangkan program kerja lima tahun ke depan untuk melakukan restorasi DAS atau usaha mengembalikan sungai ke fungsi semula. Restorasi DAS di Sumsel merupakan tanggung jawab semua

pihak, mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat umum.

Forum DAS Sumsel sendiri terbentuk dengan SK Gubernur yang personelnya berasal dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, praktisi, advokat, media dan masyarakat umum yang peduli terhadap lingkungan dan pengelolaan DAS.



Pengukuhan MKTI Sumsel.



Suasana saat pembukaan.

DOKUMEN FORUM DAS SUMSEL

Edward mengatakan, Forum DAS Sumsel sudah melakukan studi banding ke Forum DAS Cidanau, Tangerang, Banten. Belajar dari pengelolaan sungai Cidanau, maka Forum DAS Sumsel menyusun rencana pengelolaan DAS Terpadu Musi. Forum DAS juga sudah melakukan rakor dengan seluruh stakeholder di Kabupaten Lahat pada 1 Desember lalu, serta melakukan penanaman pohon di pinggir Sungai Lematang sebagai tanda dicanangkannya restorasi DAS Musi lima tahun ke depan.

Semua kegiatan Fordas Sumsel bertujuan untuk menyamakan persepsi para pihak untuk memulai melakukan pengelolaan DAS Musi, diantaranya

menurunkan laju lahan kritis, kejadian banjir, meningkatkan kualitas air, serta mempertimbangkan DAS sebagai salah satu kesatuan pengelolaan antara hulu dan hilir, lintas sektor dan lintas wilayah di semua kabupaten kota di Sumsel. "Kita juga melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak di antaranya, Pemkab Lahat, Mura, Muaraenim, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Pagar Alam, perusahaan pertambangan batubara, pertambangan migas, perkebunan kelapa sawit, dan masyarakat umum untuk menyamakan persepsi dalam menyelamatkan ekosistem sungai," ujarnya.

Menurut Edward, restorasi DAS di Sumsel merupakan tanggungjawab

semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta hingga masyarakat umum. Sedangkan Fordas Sumsel terbentuk dengan SK Gubernur yang terdiri dari pemerintah, swasta, akademisi, praktisi, advokat, dan masyarakat umum yang peduli terhadap lingkungan dan pengelolaan DAS.

Agar hasil optimal, dihadirkan pemateri dari Fordas Nasional Prof Dr Naik Sinukaban, Dirjen Bina DAS dan Perhutanan Sosial Dr Ir Saiful Anwar, Ketua Fordas Sumsel Dr Ir Edward Saleh MS, Dirjenbun Kementerian Pertanian, PT Sebangun Bumi Andalas Sujica Wana Lukasana ST M Eng Mgt, dan Guru besar Unsri Prof Dr Andi Mulyana M Sc. dengan dipandu moderator, Dr Ir Karlin Agustina. (san)

